



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Banyak Masalah ,Banyak Proyek**

**BENGKULU** - Kejangga-  
lan atas pelaksanaan proyek  
pembangunan jembatan  
Air Padang Kecamatan Lais  
Bengkulu Utara (BU) mulai  
terkuak. Bukan hanya lanta-  
ran lewat kontrak dan kini  
jalan di tempat. Namun pe-  
rusahaan pelaksana proyek  
senilai Rp 28,5 miliar terse-  
but juga dikenal sebagai  
perusahaan bermasalah.  
Tercatat tiga direktur  
PT Adhitya Mulia Mitra  
Sejajar (AMMS) pernah  
terjerat kasus hukum dan  
ditetapkan tersangka  
hingga dijebloskan ke  
penjara.

Pertama 2010 lalu Kejari Bintu-  
han menetapkan Direktur PT AMMS  
berinisial PT sebagai tersangka kasus  
pembangunan jalan Pasar Rebo -  
Muara Dua Kabupaten Kaur lantaran  
ditemukan kerugian negara Rp 131  
juta.

Kedua, tahun 2012 direktur PT AMMS  
berinisial SY juga ikut dijebloskan ke  
penjara oleh Kejari Mukomuko terkait  
pembangunan jemabatan gantung  
Pasar Sebalah. Ditemukan kerugian  
negara Rp 353 juta dari nilai proyek Rp  
7 miliar yang putus kontrak tersebut.

Tak sampai disitu, 2013 Direkrut PT  
AMMS berinisial EI juga kembali di-  
jebloskan ke penjara oleh Kejari Kaur  
terkait pembangunan jalan Muara  
Sahung - Air Tembok senilai Rp 2,6  
miliar. Ditemukan kerugian negara  
Rp 1 miliar karena kekurangan volume  
pembangunan.

Selain itu ada tiga pekerjaan lain yang  
juga menjadi sorotan lantaran lambat  
dimulainya pekerjaan dan putus kon-  
trak hingga pekerjaannya tidak selesai.  
Ketiganya masing-masing rehab jarin-  
gan irigasi Selama senilai Rp 9,7 miliar.

Selanjutnya pembangunan duplikasi  
jembatan Air Bengkenang Rp 15,5  
miliar yang tidak selesai. Pembangu-  
nan jalan Napal Jungur - Timbuan Rp

5,3 miliar yang terlambat dimulainya  
pembangunan.

Dari keenam permasalahan pemban-  
gungan yang dilakukan oleh PT AMMS  
tersebut, nyatanya perusahaan terse-  
but masih mendapatkan paket proyek  
2019 lalu dari Satker Kementerian  
PUPR Wilayah I Provinsi Bengkulu.  
Bahkan nilainya cukup fantastis Rp  
28,5 miliar dan kini pembangunan  
jembatan tersebut juga mangkrak.

Menariknya, Kepala Satker Kement-  
erian PUPR Wilayah I Provinsi Bengkulu  
Abdul Halim, ST, MT mengaku menge-  
tahui jika perusahaan tersebut adalah  
perusahaan yang bermasalah. Ini  
lantaran perusahaan memang kerap  
mengerjakan pekerjaan di tempat ker-  
janya dan pekerjaannya bermasalah.  
"Kami paham PT AMMS itu bermal-  
salah, tapi dia memang pemenang  
lelang dan berhak mendapatkan pe-  
kerjaan tersebut," terangnya.

Ia menuturkan jika PT AMMS  
melakukan penawaran terendah  
dalam lelang elektronik. Dari Rp 35  
miliar pagu anggaran yang dianggar-  
kan Satker, PT AMMS menawar Rp 28,5  
miliar dan memenuhi syarat sehingga  
ia berhak mengerjakan proyek.

"Karena lelang ecara elektronik, jadi  
memang terbuka dan seluruhnya  
berdasarkan dokumen yang diu-  
pload secara elektronik. Siapapun

pemenangnya, kita sahkan. Meskipun  
tahu perusahaan itu bermasalah," ujar  
Halim.

Namun ia memastikan akan meli-  
hat perkembangan pembangunan  
sesuai kontrak perpanjangan pertama  
selama 50 hari. Jika memang progres  
pembangunan sesuai yang diharap-  
kan dan pembangunan belum selesai,  
maka bisa diberikan lagi perpanjangan  
kedua selama 40 hari.

"Tapi jika tidak sesuai progres, akan  
kita stop kontrak dan menghitung ses-  
uai dengan fisik yang ada di lapangan,"  
tegasnya.

**Denda Perusahaan Rp 1,4 Miliar**

Selain memang sampai saat ini tidak  
ada pengerjaan yang dilakukan peru-  
sahaan. Perusahaan juga akan dike-  
nakkan denda membayar Rp 1,4 miliar  
selama 50 hari perpanjangan waktu  
pelaksanaan. Hitungan denda tersebut  
adalah 1/1.000 dikalikan nominal kon-  
trak atau Rp 28,5 Juta perhari.

Besaran denda akan bertambah lagi  
jika memang PT AMMS dan Satker  
setuju untuk dilakukan perpanjangan  
kontrak dengan masa denda 40 hari  
berikutnya.

"Dana baru kita bayarkan sebesar 30  
persen. Nanti kita lakukan penghitun-  
gan jumlah fisik terakhir jika memang  
putus kontrak. (qia)